

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga merupakan suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu program yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Dalam organisasi sektor publik anggaran juga memiliki pengertian tersendiri. Berikut ini pengertian menurut para ahli yang mengemukakan pengertian anggaran sektor publik :

Menurut pendapat Indra Bastian (2010:191) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik anggaran dapat diinterpretasikan sebagai “Paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode dan mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu”.

Peraturan menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2019 tentang anggaran mendefinisikan bahwa anggaran pendapatan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Anggaran publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik.

Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk di sajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar- ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakaiannya dalam membuat atau mengambil keputusan. Pengukuran kinerja berasal dari pengukuran efektivitas produk sehingga jika mengabaikan salah satu diantara kedua komponen tersebut maka akan memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai kinerja dari organisasi. Menurut Mouzas (2006) yang membuat penelitian pada evaluasi mengatakan bahwa kinerja organisasi harus dinilai secara bersamaan baik pada segi efisien pemanfaatan sumber daya maupun pada efektivitas dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat keberhasilan pengukuran ini biasanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan Anggaran antara pendapatan dan belanja apabila terjadi deficit atau surplus anggaran berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dengan adanya baramotor keberhasilan anggaran instansi seperti itu maka terbentuklah pemikiran bahwa penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan harus (100%) agar tidak terjadi surplus atau deficit tanpa memperhatikan efektivitas.

Peraturan menteri dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (4) menjelaskan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu instansi.

Memberikan tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada instansi yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai apakah kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan instansi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Julita (2015) mengemukakan anggaran sebagai rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif selama jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Keterkaitan antara Anggaran dan Realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varian anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Persoalan anggaran pada Distrik Navigasi Kelas I Belawan masih terus berulang dari segi perencanaan keuangan dan kegiatan. laporan realisasi anggaran pada Distrik Navigasi Kelas I Belawan pada tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dan penurunan pada anggaran dan realisasi. Dibuktikan dengan tabel berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efektivitas (%)	Kenaikan/ Penurunan (%)
2019	58.445.893,132	59.834.249,000	97,68%	0
2020	45.217.053,439	46.979.817,000	96,24%	(1,44)
2021	46.718.098,441	48.044.607,000	97,24%	1
2022	43.258.995,839	44.295.625,000	97,66%	0,42

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Distrik Navigasi Kelas I Belawan pada tahun 2019-2022 memiliki tingkat efektivitas di atas 90%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran Distrik Navigasi Kelas I Belawan cukup efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. Selama tahun 2019-2022 anggaran semakin meningkat, dengan nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan persentase 97,68%. Begitupun tahun sesudahnya, nilai efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu dengan persentase 96,24% dengan penurunan 1,44%. Dibanding tahun 2021 dengan persentase sebesar 97,24% dengan kenaikan 1% dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami grafik yang naik turun, nilai persentase efektivitas pengelolaan keuangan Distrik Navigasi Kelas I Belawan selama 4 tahun periode anggaran cukup efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai di atas 90%. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Anggaran Pada Distrik Navigasi Kelas I Belawan"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada Distrik Navigasi Kelas I Belawan yaitu :

1. Terjadinya ketidak stabilan yang mengakibatkan naik dan turunnya nilai efektifitas pada pengelolaan anggaran selama empat tahun yakni dari tahun 2019-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kinerja pada Distrik Navigasi Kelas I Belawan dalam merealisasikan anggaran sudah berjalan efektif?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja anggaran pada Distrik Navigasi Kelas I Belawan sudah berjalan efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diberikan kepada beberapa pihak antara lain :

1. Bagi peneliti,
Untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman serta wawasan mengenai realisasi anggaran untuk menilai kinerja efektivitas.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijaksanaan yang akan di ambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Jamaluddin, 2019). Pemerintah yang bersih diharapkan oleh masyarakat untuk menyediakan informasi secara transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan. Jadi pemerintah bisa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa laporan pengelolaan keuangan yang disusun sesuai akuntansi untuk sektor publik (Laila & Handayani, 2019).

Organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan suatu kegiatan (Jamaluddin, 2019). *Value for money* sendiri bisa diartikan dengan pengukuran kinerja sektor publik memberikan informasi tentang suatu anggaran yang telah dibelanjakan sudah menghasilkan sesuatu nilai atau tidak bagi masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. *Value for*

money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasar konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal ini dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik (Nurkholis & Khusaini, 2019).

Dengan penerapan prinsip efektivitas untuk anggaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, prinsip efektivitas inilah yang menjadi indikator dalam kinerja suatu entitas (*Waney, et. Al., 2018*).

Julita mengemukakan anggaran sebagai rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif selama jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam suatu barang (Anggaran, 2017). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah bagian penting dalam suatu instansi dan berfungsi untuk mengetahui keadaan keuangannya (Heldawati, 2021).

Mardiasmo (2009:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu lembaga atau instansi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap kegiatan dan aktifitas dalam satuan moneter. Anggaran harus

dipublikasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana publik.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012:19). Sedangkan pengertian anggaran menurut "Commite on Governmental Accounting" yang dikutip oleh (Haruman, 2010:6) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam lembaga atau instansi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Penggunaan realisasi anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya. Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa dan wilayah itu sendiri. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu turunnya perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak boleh diabaikan.

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran dapat merencanakan, mengatur, dan

mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu lembaga atau instansi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012). Sedangkan pengertian anggaran menurut *Commite on Governmental Accounting* yang dikutip oleh (Haruman, 2010) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Indra Bastian (2010;166) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan

berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visidan misi yang ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat kontrol, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam penempatan anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

- 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
- 2) Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavourable variances*).
- 3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varian.
- 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*).

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian berlembaga dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para pimpinan publik.

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*).

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik dan mampu memprediksi terjadinya *inkonsistensi* suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan lembaga atau instansi.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (*legislatif*). Kinerja *eksekutif* akan dinilai

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja pimpinan publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, di hubungkan dengan anggaran yang di sepakati.

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*).

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan lembaga yang telah disepakati. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable* maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Share*)

Fungsi ini hanya berlaku pada lembaga swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keikutsertaan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik.

2.1.3 Anggaran

Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk

membayai dalam periode waktu tertentu. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Dari Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi usulan penguraian yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertanggung jawaban kepada publik.

a. Pentingnya Anggaran

Pentingnya Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi. menjamin kesinambungan. Dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran

Rugayah et al. (2017) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat memperkirakan tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidak pastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.1.5 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2011:22) efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi *output* yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit lembaga atau instansi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*. Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batasan anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah direncanakan. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2010:131) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Makmur (2011:17-19) mengungkapkan Indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas kinerja pemerintah, sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu.
- b. Ketepatan perhitungan biaya.
- c. Ketepatan dalam pengukuran.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
- e. Ketepatan berpikir.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan.
- h. Ketepatan ketepatan sasaran.

2.1.6 Pengukuran Efektivitas Kinerja

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja adalah manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Value for money ialah suatu konsep pengukuran kinerja yang sering dipakai oleh suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kinerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Melalui konsep *value for money* dapat memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi perusahaan tersebut. Dalam organisasi sektor publik dinilai sebagai sarang inefisien, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugikan. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui metode *value for money*, selain dapat menilai finansial, terdapat pula penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yakni memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran.

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan

sistematis. *Value for money* merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari *input, output* dan *outcome*. *Value for money* menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas tersebut secara bersama-sama.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

1. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik adalah:

- a) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang mestinya. pemimpin dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.
- b) Menyiapkan sarana pembelajaran pegawai Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak.
- c) Memperbaiki kinerja periode berikutnya Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan

datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi didalam organisasi. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik dari pada sekarang.

- d) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment* Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau *punishment* misalnya pemutusan kerja dan penundaan.
- e) Memotivasi Pegawai Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.
- f) Menciptakan akuntabilitas publik Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang dipublikasikan bagi pihak internal maupun eksternal.

2. Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja adalah :

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.

- b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- e) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- f) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- g) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran dengan rumus sebagai berikut: (Yunianti, 2015).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan dan biasanya digunakan untuk membandingkan antara penelitian yang dibuat dengan penelitian orang lain. Penelitian tentang kinerja realisasi anggaran telah banyak mengalami perkembangan. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan efektivitas kinerja. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, ada faktor-faktor

yang berpengaruh positif namun ada juga yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja realisasi anggaran. Yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN	JUDUL	HASIL
1	Rukayah 1), Nugrahini Kusumawati2), Raden Irna 3)Afriani (Jurnal Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan dengan anggaran pendapatannya. Dapat dilihat dari laporan realisasi tahun 2014 sampai 2016 dari perhitungan rata-rata rasio efektivitasnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hal ini berarti pemerintah badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten Serang dapat dikatakan berhasil. Efisiensi badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten Serang tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efisiensinya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam kriteria kurang efisien. Hal ini berarti pemerintah badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten Serang dapat dikatakan kurang berhasil dalam merealisasikan belanja dengan anggaran belanjanya.
2	Siti Mardhiyah Ulfa, 2018	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 dikatakan tidak efektif disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih sangat jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang

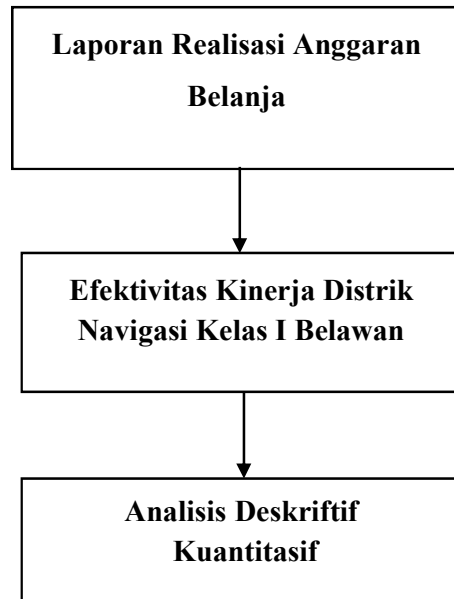
			ditetapkan, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 masih dikatakan cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 belum mencapai target yang ditentukan.
3	Sella Ria Purwanti, 2018.	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Pada Kantor Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Periode 2013-2017	Hasil penelitian ini adalah (1) Kinerja Pemerintah Kelurahan Kutoanyar melakukan optimalisasi anggaran secara efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan realisasi anggaran tahun anggaran 2013-2017 sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2) Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Kutoanyar tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan efektif yaitu memiliki rasio efektivitas rata-rata 97,98% (3) Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di Kelurahan Kutoanyar tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan efisien yaitu memiliki rata-rata 87,47%.
4	Hani Hatimatunnisani, Dewi Purwanti Kosasih, 2019	Analisis Realisasi Anggaran Dalam Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Di Puslitbang Jalan Dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Kota Bandung.	Hasil analisis realisasi anggaran dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bandung. hasil perhitungan, menunjukkan rata-rata efektivitas kinerja sebesar 103,80% yang artinya bahwa efektivitas kinerja Puslitbang Jalan dan Jembatan dikatakan sangat efektif. Sedangkan rata-rata efisiensi kinerja yaitu sebesar 94,60% artinya bahwa hasil analisis tersebut dikatakan kurang

			efisien. Dapat disimpulkan bahwa Puslitbang Jalan dan Jembatan sangat efektif dalam memperoleh pendapatannya tetapi kurang efisien dalam mengelola belanjanya.
5	Fitri Pida, 2021.	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektifitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019 pekanbaru kinerjanya sudah berjalan efektif sesuai yang di targetkan dan sudah mencapai nilai realisasinya sesuai ketentuan walaupun terjadi naik turun nya anggaran realisasi yang sudah ditentukan dan tidak pernah di bawah rata rata.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran merupakan bagan yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan penelitian berdasarkan pemaparan studi teoritik penelitian ini menghasilkan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang di gunakan yaitu realisasi anggaran dan variabel efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan dari penjelasan teori diatas maka realisasi anggaran merupakan variabel yang sangat berperan penting dalam suatu pembahasan Pendapatan guna untuk melihat kinerja suatu Sistem perusahaan, dengan adanya realisasi anggaran.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir